

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT BPR SRI PARTHA BALI
TAHUN 2022



Jl. Prof Moh Yamin No 7 Denpasar TELEPON:
0361 4746844

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Sri Partha Bali pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Sri Partha Bali memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK, sehingga dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sri Partha Bali didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organisasi bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Sri Partha Bali

Untuk meningkatkan kinerja Bank, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, maka PT. BPR Sri Partha Bali senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatannya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan.

Di sepanjang tahun 2022 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sri Partha Bali terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Made Suardika SH
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang - undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai 			
2.	Nama	:	I Made Marlan SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko c. Menetapkan langkah - langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai 			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional bank

<p>b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan /peraturan yang berlaku</p> <p>d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak covid-19 sudah dilaksanakan</p> <p>e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sesuai dateline</p> <p>f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Made Meiarthayasa MBA
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direski serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.</p>			
2.	Nama	:	Ida Ayu Puspawati SE
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direski serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.</p>			

- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.
- g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Rekomendasi Kepada Direksi :

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara Konsisten dan Penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan kredit
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak Covid 19, agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindak lanjuti sesuai dateline yang ditentukan
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan, dan dicontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
Penjelasan Lebih Lanjut				
PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M				

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Suardika SH	Rp0,00	0%
2.	I Made Marlan SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak terdapat kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR Sri Partha Bali			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Suardika SH	-	-	0%
2.	I Made Marlan SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Made Suardika SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Marlan SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Made Suardika SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Marlan SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keluarga anggota direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Meiarthayasa MBA	Rp7.200.000.000,00	40%
2.	Ida Ayu Puspawati SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris Utama memiliki saham 40% pada BPR Sri Partha Bali			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Meiarthayasa MBA	601050	PT. BPR Ashi	40%
2.	I Made Meiarthayasa MBA	601048	PT. BPR Antenk	37.5%
3.	I Made Meiarthayasa MBA	601049	PT. BPR Tish	20%
4.	I Made Meiarthayasa MBA	601025	PT. BPR Pusaka	40%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Made Meiarthayasa MBA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Ayu Puspawati SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keuangan antara Anggota Dewan Komisaris pada BPR Sri Partha Bali				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Made Meiarthayasa MBA	Tidak ada	Tidak ada	I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, Ni Wayan Yuniartha SEMM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
2.	Ida Ayu Puspawati SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp317.990.400,00	2	Rp269.848.800,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp317.990.400,00		Rp269.848.800,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Dewan Komisaris hanya memiliki paket remunerasi berupa Gaji					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi mendapatkan fasilitas lain berupa mobil dinas			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.94 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.44 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.22 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.46 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR Sri Partha Bali	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	11 April 2022	2	Pembahasan terkait Evaluasi kinerja sampai dengan Maret 2022 dan saran - saran dan keputusan rapat untuk mengatasi kondisi BSP
2.	11 Juli 2022	2	Pembahasan terkait Evaluasi kinerja sampai dengan Juni 2022 dan saran - saran dan keputusan rapat untuk mengatasi kondisi BSP

3.	14 Oktober 2022	2	Pembahasan terkait Evaluasi kinerja sampai dengan September 2022 dan saran - saran dan keputusan rapat untuk mengatasi kondisi BSP
4.	26 Desember 2022	2	Pembahasan terkait Evaluasi kinerja sampai dengan Desember 2022 dan saran - saran dan keputusan rapat untuk mengatasi kondisi BSP
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan 4 kali selama tahun 2022			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Made Meiarthayasa MBA	4	0	100%
2.	Ida Ayu Puspawati SE	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris selalu hadir dan tepat waktu saat pelaksanaan rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada penyimpangan internal (Fraud) yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	4	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
selama periode tahun pelaporan 2022 masih terdapat satu permasalahan hukum perdata yang dalam proses penyelesaian		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama Tahun 2022 di BPR Sri Partha Bali tidak terdapat transaksi yang mengandung BenturanKepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Maret 2022	Sosial	Dana Punia Ke Pura Besakih dan Pura Batur	Panitia Di Pura Besakih dan Batur	Rp1.000.000,00
2.	09 Mei 2022	Sosial	Dana Punia Di Pura Melanting	Bendahara Pura	Rp300.000,00
3.	30 Juni 2022	Sosial	Dana Punia Di Pura Uluwatu	Bendahara Pura	Rp100.000,00
4.	02 Agustus 2022	Sosial	Iuran Br. SembungSari	Kelian Banjar	Rp525.000,00
5.	16 November 2022	Sosial	Dana Punia ke Pura Dalem Sumerta	Bendahara Pura	Rp500.000,00
6.	21 November 2022	Sosial	Sumbangansponsorsip universitas	Universitas Warmadewa	Rp150.000,00

			warmadewa		
7.	28 Desember 2022	Sosial	Sumbangan Dana Ke Panti Asuhan Tat Twam Asi	Ketua Yayasan	Rp2.400.000,00
8.	28 Desember 2022	Sosial	Sumbangan dan ke panti asuhan Dharma Jati Bali	Ketua Yayasan	Rp2.400.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
PT BPR Sri Partha Bali menyediakan dana CSR untuk kegiatan sosial					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUMPENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR SRI PARTHA BALI
Alamat	: Jl. Prof Moh Yamin No 7 Denpasar
Nomor Telepon	: 0361 4746844
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp6.684.919.082,00
Total Aset	: Rp49.955.852.772,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR SRI PARTHA BALI Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.27	0.254
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.00	0.200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.27)

Jumlah Direksi PT BPR Sri Partha Bali sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independent, Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Dewan Komisaris BPR Sri Partha Bali sudah sesuai ketentuan, tidak melampaui jumlah anggota Direksi dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS, Komisaris Utama merupakan pemegang saham pengendali tetapi itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

mengingat modal inti BPR Sri Partha Bali masih dibawah RP 50M dan belum ada kewajiban untuk membentuk Fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR Sri Partha Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang dituangkan dalam pedoman intern , seluruh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk salah satu karyawan sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan, PE kepatuhan menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja , sistem, dan prosedur kepatuhan. dan BPR Sri Partha Bali juga memiliki pedoman terkait Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

BPr Sri Partha Bali telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, PEAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direkstur Utama dan BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek - aspek legalitas kerja, ruang lingkup audit, standar operasional akuntan publik, BPR menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS, BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan manajemen letter kepada OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

BPR Sri Partha Bali sudah menunjuk PE yang membawakan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan BPR Sri Partha Bali telah memiliki kebijakan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko dan BPR Sri Partha Bali telah menyusun dan melaporkan profil risiko kepada OJK

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

RBB telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan baik termasuk perubahannya sudah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kin dan utuh. BPR Konsisten menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan sesuai ketentuan, laporan tersebut disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK

C. Kesimpulan Umum

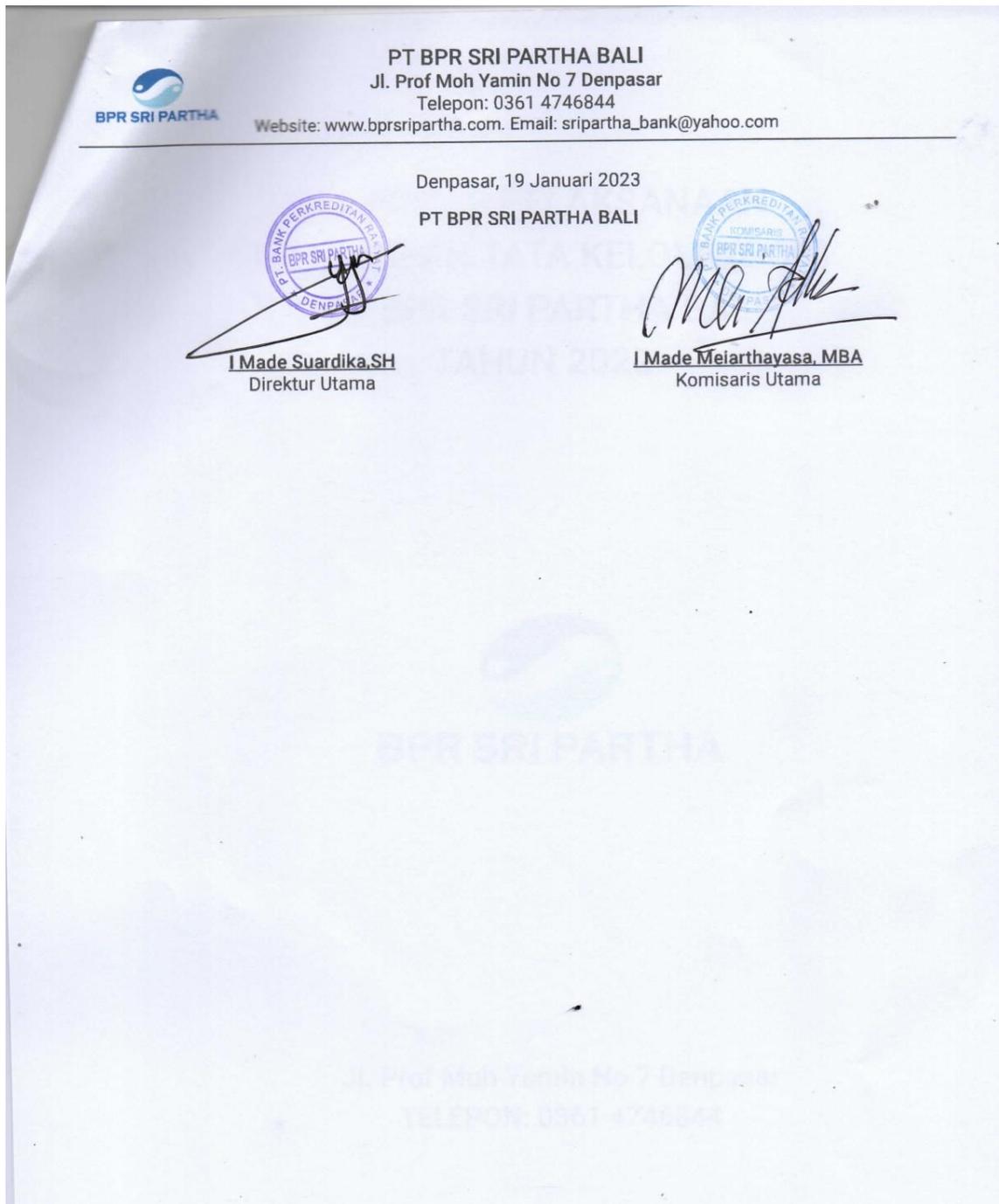
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing - masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR dengan senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Sri Partha Bali

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

504989-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601046-24012023084638

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

sripartha_bank@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-24 08:46:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.